



**2025**

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur** dapat di susun dan di selesaikan dengan baik. Laporan ini di susun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Penyusunan LKPJ tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan amant peraturan perundang-undangan serta sebagai sarana evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat program, kegiatan, pengelolaan anggaran, serta capaian kinerja dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian.

Pelaksanaan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu "*Luwu Timur Maju dan Sejahtera*". Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan strategis dalam mewujudkan visi tersebut melalui upaya peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan sistim agribisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih terdapat keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, LKPJ ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di kabupaten luwu timur.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat menuju Kabupaten Luwu Timur Yang Maju dan Sejahtera.

Malili, 27 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pertanian  
dan Ketahanan Pangan



**SUBHANG, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 197103252002121005

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	4
1.4. Data Umum Perangkat Daerah.....	6
1.4.1. Sumber daya Manusia /Jumlah ASN .....	8
1.4.2. Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	11
1.4.3. Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	12
<b>BAB II PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	14
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	22
3.2. Kebijakan Strategis yang di tetapkan.....	39
3.3. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah.....	40
3.4. Kerjasama Daerah .....	49
3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD .....	51
3.6. Penghargaan .....	52
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	
4.1. Urusan Pemerintahan yang di Tugas-Pembantuan .....	53
4.2. Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75

## DAFTAR TABEL

**Hal**

Tabel 1.1.	Tujuan, Sasaran, Target dan Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.....	5
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	8
Tabel 1.3.	Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	9
Tabel 1.4.	Jumlah pejabat fungsional berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 .....	10
Tabel 1.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	11
Tabel 1.6.	Capaian Target dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 .....	13
Tabel 2.1.	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 .....	15
Tabel 3.1.	Pelaksanaan urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar.....	24
Tabel 3.2.	Pelaksanaan Urusan Pilihan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 .....	26
Tabel 3.3.	Pelaksanaan Urusan Penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 .....	36
Tabel 3.4	Kebijakan Strategis pada Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	40
Tabel 3.5	Realisasi Keuangan pada urusan Dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025.....	42
Tabel 3.6	Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Dilaksanakan Sampai dengan Tahun 2025.....	49
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Kerjasama Antar Daerah.....	50
Tabel 3.9	Rekomendasi RKPD dan Tindaklanjut Tahun N-1 pada Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	51
Tabel 3.10	Penghargaan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan .....	52
Tabel 4.1	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 .....	53
Tabel 4.2	Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 .....	54
Tabel 4.3	Uraian Kinerja, Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Tugas pembantuan Dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025.....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKPJ disusun untuk menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025, yang mencakup pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan LKPJ Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua aztas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indoinesia tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 9687.
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2012 nomor 5, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5272);
11. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2019 nomor 6322);
12. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 33);
13. Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mengatur jenis laporan, materi muatan, serta tata cara penyusunan dan penyampaian LKPJ dinas pertanian dan ketahanan pangan.
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan nomor 13 tahun 2019, sebagai pedoman teknis dalam penyusunan LKPJ, termasuk sistematika dan mekanisme evaluasi.
15. Peraturan daerah kabupaten luwu timur tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ.
16. Peraturan bupati luwu timur tentang penjabaran APBD kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025, yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan anggaran oleh seluruh perangkat daerah.
17. Peraturan daerah kabupaten luwu timur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten luwu timur serta peraturan bupati luwu timur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten luwu timur tahun 2025, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2019 nomor 6322);
19. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 33);
20. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa sesuai peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada ketentuan umum pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang me
21. nyangkut pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dan pada pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada dewan perwakilan rakyat daerahh dalam rapat

- paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang perturan pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Bahwa sesuai peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentangg peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada BAB III penyusunan dan penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban pasal 14 ayat satu menjelaskan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi :
    - a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
    - b. Hasil pelaksanaan tugas pembantu dan penugasan.
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
  24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
  25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 87);

## 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 yakni : **“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”** menggambarkan komitmen pemerintah kabuoaten luwu timur dalam mewujudkan daerah yang berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, perlu kita ketahui makna dari kata Maju dan Sejahtera” adalah :

**MAJU**, dimaknai sebagai kondisi daerah yang mengalami peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor seperti Infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, sedangkan

**SEJAHTERA**, mencerminkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, sehat, berpendidikan, memiliki pendapatan yang layak, serta memperoleh pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Visi ini menegaskan arah pembangunan luwu timur yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan 2 (Dua) misi, yakni :

Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang dicapai melalui meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata

Misi 6 : Terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan adanya pelaksanaan misi tersebut secara terintegrasi dan berkesinambungan sehingga diharapkan pembanguann kabupaten luwu timur dapat berjalan secara optimal, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berlandaskan pada Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di dalam pencapaian ketahanan pangan daerah yang diharapkan akan terus meningkat, telah menetapkan **“Meningkatnya produksi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan”** sebagai *tujuan* dengan *sasaran* sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
2. Meningkatkan Produksi Pertanian
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan.

Adapun dari tujuan diatas pada sub sektor pertanian dan Ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025-2029 tersebut memiliki sasaran dan indikator sasaran strategis (tinjau tabel 1.1). Dimana dinas pertanian dan Ketahanan Pangan kabuapaten luwu timur memiliki 3 (tiga) sasaran renstra dengan 5 (lima) indikator sasaran.



Tabel 1.1.  
Tujuan, Sasaran, Target dan Indikator Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>											
Meningkatnya ketahanan pangan daerah (S7)	Meningkatnya produksi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan (Nilai)	90,4	90,5	91	91,5	92	92,5	93	
			Persentase ketersediaan pangan utama (%)	100	95	95	95	95	95	95	
			Penguatan cadangan pangan (%)	16,77	36,95	49,05	62,5	75,92	89,4	93	
		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	2,97	2,88	2,81	2,89	3,29	3,76	3,88	
			Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	14,8	1,51	1,66	1,96	2,33	2,57	2,72	
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP (Nilai)	67	70,05	70,5	71	71,5	71,20	72,5	

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, data diolah Tahun 2026

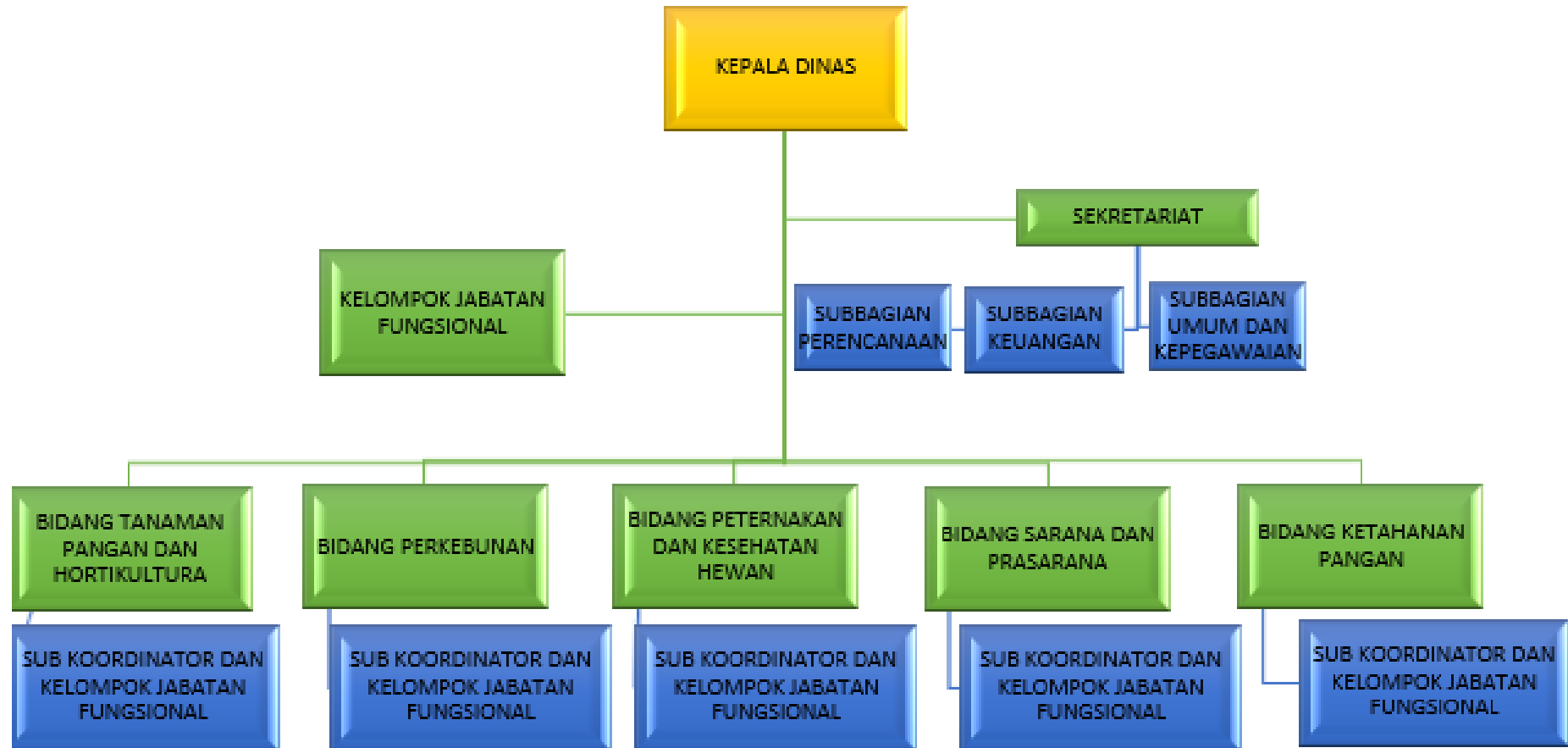
#### **1.4. Data Umum Perangkat Daerah**

Struktur organisasi dan rincian tugas jabatan struktural Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 87 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sebagai mana kita ketahui data umum dinas pertanian dan ketahanan pangan itu terdapat pegawai Struktural, Fungsional Penyetaraan, Fungsional penyuluh pertanian dan Upahjasa, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi itu mempunyai rincian tugas masing berdasarkan peraturan bupati nomor 87 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian dan ketahanan pangan pada pasal 3 yang mana susunan organisasi tersebut terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas yang terdiri dari :
3. Sub bagian perencanaan
4. Sub bagian Keuangan, dan
5. Sub bagian Umum dan kepegawaian
6. Bidang tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari jabatan fungsional
7. Bidang Perkebunan terdiri dari kelompok jabatan fungsional terdiri dari
8. Bidang Sarana dan prasarana terdiri dari kelompok jabatan fungsional
9. Bidang peternakan dan Kesehatan hewan terdiri dari kelompok jabatan fungsional
10. Bidang ketahanan pangan terdiri dari jabatan fungsional
11. UPTD IKB
12. UPTD Penyuluhan terdiri dari kelompok jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur



Untuk menjalankan struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang kompleks tersebut, Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan dan kualitas kedua jenis sumber daya ini menjadi faktor penentu keberhasilan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuannya.

#### 1.4.1. Sumber Daya Manusia (Jumlah ASN)

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dinas pertanian dan ketahanan pangan adalah implementator kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupateb Luwu Timur yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan dalam urusan pertanian dan pangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Susunan Struktur organisasi, maka diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (tenaga kontrak) yang memadai dengan kemampuan menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pembangunan daerah untuk kepentingan Publik dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang optimal.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan- kegiatan yang telah direncanakan untuk pembangunan kabupaten luwu timur, itu terdiri dari pegawai/personil yang masih produktif, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1/D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SDSederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IV	10	14	8	7									18	21
2	III	7	10	43	50	2	4	6	2					58	66
3	II							8	1	1				9	1
4	CPNSD			10	29									10	29
5	PPPK			18	21			8	8					26	29
6	Upah jasa			2	12			1	2		1			3	15
Jumlah		17	24	81	119	2	4	23	15	1	1			135	152

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, data diolah Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, jumlah pegawai secara keseluruhan tercatat sebanyak 287 orang, yang terdiri dari 135 pegawai laki-laki dan 152 pegawai perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterlibatan sumber daya manusia yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Ditinjau dari golongan, pegawai paling banyak berada pada golongan III, yaitu sebanyak 165 orang, yang mayoritas memiliki kualifikasi pendidikan S1/D1V. Hal ini mencerminkan bahwa struktur kepegawaian dinas pertanian dan ketahanan pangan didominasi oleh tenaga pelaksana dan fungsional yang memiliki kompetensi pendidikan menengah hingga tinggi, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Selanjutnya, pegawai golongan IV berjumlah 39 orang, yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan S2 dan S1, dan umumnya menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Sementara itu, golongan II berjumlah relatif lebih sedikit dan didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA/Sederajat.

Selain pegawai negeri sipil, dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur juga di dukung oleh CPNS, PPPK, dan tenaga upahjasa. Keberadaan PPPK dan tenaga upahjasa berperan penting dalam mendukung operasional dinas, khususnya pada kegiatan teknis lapangan, administrasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, terutama pada jenjang S1/DIV dan S2, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pertanian dan ketahanan pangan di kabupaten luwu timur.

Tabel 1.3  
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
dan Jenis Kelamin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Sstruktural	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan													
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Eselon IIa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Eselon IIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Eselon IIIa	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
4	Eselon IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Eselon IVa	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

No.	Pejabat Sstruktural	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan													
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
6	Eselon I/b	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, data diolah Tahun 2026

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural/eselon berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 secara keseluruhan sebanyak 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan pada S3/S2 dan S1/DIV, Total keseluruhan dari jumlah pejabat struktural itu diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pertanian dan ketahanan pangan dikabupaten luwu timur.

Tabel 1.4  
Jumlah pejabat fungsional berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025

No	Pejabat Fungsional	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1/D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Fungsional Penyetaraan	1	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
2	Fungsional tertentu		2	9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	9	24
3	Fungsional Penyuluh Pertanian	7	17	53	34	0	2	11	1	0	0	0	0	71	54
	Jumlah	8	22	65	61	0	2	11	1	0	0	0	0	84	86

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, data diolah Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025, jumlah pejabat fungsional di dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupoaten luwu timur tercatat sebanyak 170 orang, terdiri dari 84 orang laki-laki dan 86 orang perempuan. Data ini berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin. Sevara umum, mayoritas pejabat fungsional memiliki kualifikasi pendidikan S1/DIV (126 orang yang teridir 65 laki-laki dan 61 perempuan), Kualitas lain yaitu SLTA/ sederajat (12 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan), serta D1/D3 itu hanya terdiri 1 orang laki-laki. Tidak ada pejabat dengan kualifikasi SMP/ Sederajat dan SD/ Sederajat pada seluruh jenjang jabatan fungsional.



#### 1.4.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan adanya pendapatan ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.

Anggaran pendapatan Dinas pertanian dan ketahanan pangan merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun yang mana pada anggarannya ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah yang dimaksud bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

Adapun Rincian Anggaran Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5  
Target dan Realisasi Pendapatan  
Dinas pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran Pokok	Jumlah Anggaran Perubahan	Penerimaan	Jumlah Anggaran Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Belum Terealisasi/ Melampaui anggaran
<b>Pendapatan</b>	Rp 777.000.000	-	Rp 990.965.200	Rp 990.965.200	Rp 213.965.200
Pendapatan Asli Daerah	Rp 777.000.000	-	Rp 990.965.200	Rp 990.965.200	Rp 213.965.200
Retribusi Jenis Usaha	-				
Retribusi Jualan Produksi Usaha Daerah	Rp 777.000.000	-	Rp 990.965.200	Rp 990.965.200	
<b>Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha daerah Berupa Bibit Atau Benih Tanaman</b>	Rp 777.000.000	-	Rp 990.965.200	Rp 990.965.200	-
Instalasi Kebun Benih Padi (IKB)	Rp 777.000.000	-	Rp 990.965.200	Rp 990.965.200	-

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas pendapatan Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Luwu timur tahun 2025 diketahui bahwa target pendapatan pada anggaran pokok yang ditetapkan sebesar Rp 777,000,000 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Pendapatan tersebut seluruhnya bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui retribusi daerah.

Jenis retribusi yang menjadi sumber pendapatan dinas pertanian dan ketahanan pangan berasal dari Retribusi Penjualan Produksi Hasil usaha daerah berupa Bibit atau benih tanaman, yang dikelola melalui Instalasi Kebun Benih Padi (IKB). Retribusi ini merupakan penerimaan dari hasil penjualan benih padi kepada masyarakat atau kelompok tani sebagai bagian dari pelayanan dan dukungan dalam pengembangan sektor pertanian.

Pada tahun 2025, realisasi penerimaan pendapatan mencapai Rp 990,965,200 atau sebesar 127,53% dari target anggaran pokok. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 213,965,200. Seluruh penerimaan yang diperoleh telah terealisasi 100% dan di setorkan sesuai dengan ketentuan ke kas daerah.

Tingginya realisasi pendapatan ini mencerminkan optimalnya pengelolaan Instalasi Kebun Benih, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap benih unggul, serta efektivitas pelayanan dan distribusi benih oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan kontribusi nyata sektor pertanian dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 dapat dinilai **sangat baik**, karena mampu melampaui target yang direncanakan dan memberikan dampak positif terhadap penguatan ketahanan pangan serta peningkatan pelayanan kepada petani di wilayah kabupaten luwu timur.

#### **1.4.3. Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan itu telah menetapkan target belanja yang perlu dicapai pada tahun 2025. Adapun target belanja itu merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk dibelanjakan dalam periode tertentu, yang ditetapkan dalam dokumen anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor : DPPA/A.3/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2025 dengan rincian yakni adanya 10 program, 22 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan, dari rincian tersebut itu di kelola oleh 5 (Lima) bidang dan 2 (dua) UPTD, untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6  
Capaian Target dan Realisasi Belanja  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2025

No	Kategori Belanja	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>82.347.414.152</b>	<b>61.743.819.026,15</b>	<b>74.97%</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	81.152.134.152	60.606.054.027,15	74.68%
1	Belanja Pegawai	26.673.387.176	26.001.174.849,00	97.47%
2	Belanja Barang dan jasa	54.478.746.976	34.804.879.178,15	63.88%
	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.195.280.000</b>	<b>1.137.564.999,00</b>	<b>95.17%</b>
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.000.000	164.898.999,00	73.75%
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.003.280.000	972.666.000,00	93.99
5	Belanja Tak Terduga	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>82.347.414.152</b>	<b>61.743.819.026,15</b>	<b>74.97%</b>

Sumber : DPKP Kabupaten luwu Timur, diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel 1.6 total target belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 82.347.414.152, dengan realisasi belanja mencapai Rp 61.743.819.026,15 atau sebesar 74,97%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah telah berjalan cukup baik dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan yang dikelola oleh Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur.

Dari total belanja daerah tersebut, belanja Operasi merupakan komponen terbesar dengan target anggaran sebesar Rp 81.152.134.152 dengan realisasi sebesar Rp 60.606.054.027,15 atau 74,68%, belanja operasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin serta pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan belanja modal memiliki target anggaran sebesar Rp 1.195.280.000 dengan realisasi Rp 1.137.564.999 atau 95.17%. hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja modal telah berjalan sangat baik, khususnya dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi belanja daerah tahun 2025 telah mendukung pencapaian target program dan kegiatan, serta mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan ekuntabel.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **12.1. Perubahan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 Dinas Poertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta menyesuaikan kebijakan daerah dan prioritas pembangunan sektor [ertanian dan ketahanan pangan.

Penyesiaian anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada semester berjalan, termasuk mempertimbangkan real;isasi keuangan dan fisik, kebutuhan riil dilapangan, serta hasil pembahasan dengan perangkat daerah terkait. Selain itu, perubahan anggaran juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten luwu timur serta dukungan terhadap pencapaian visi dan misi daerah yaitu “ *LUWU TIMUR MAJU DAN SEJA HTERA*”.

Dalam perubahan anggaran tahun 2025, dina spertanian dan ketahanan pangan tetap memfokuskan alokasi anggaran pada program prioritas antara lain Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan daerah, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas sumber daya manusia. Penyesuaian alokasi belanja dilakukan secara efektif dan mengedepankan prinsip efisiensi, tanpa mengurangi capaian target kinerja yang telah di tetapkan.

Perubahan anggaran juga diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha sektor pertanian, setsa untuk mengantisipasi kebutuhan yang belum terakomodir pada anggaran murni. Dengan adanya peribahan anggaran ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur pada tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pada tahun anggaran 2025 dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur mengalami pergeseran/perubahan anggaran, yang mana dikarenakan adanya pergeseran dan tambahan pagu pada sub kegiatan yang tertuang pada nomor DPA pokok DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/002/2025, yang mana akan terjadi perubahan dengan adanya efisiensi anggaran dan penambahan pagu fisik pada nomenklatur yang tertuang pada DPPA/A.3/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2025 yang ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2025 dengan penambahan anggaran sebesar Rp 16.471.824.938.- (Enam belas milyar empat tujuh satu juta delapan dua empat ribu sembilan tiga delapan rupiah).

Adapun perubahan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur mengalami pergeseran/perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun 2025**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBDP	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
				Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100	7
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>31,490,805,233.00</b>	<b>29,202,739,726.00</b>	(2,288,065,507.00)	-7.27	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>332,184,000.00</b>	<b>76,490,000.00</b>	(255,694,000.00)	-76.97	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,274,000.00	38,319,000.00	(60,955,000.00)	-61.40	Efisiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56,604,000.00	2,001,000.00	(54,603,000.00)	-96.46	Efisiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11,630,000.00	2,433,000.00	(9,197,000.00)	-79.08	Efisiensi anggaran
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164,676,000.00	33,737,000.00	(130,939,000.00)	-79.51	Efisiensi anggaran
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>28,974,363,233.00</b>	<b>26,865,956,476.00</b>	(2,108,406,757.00)	-7.28	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,719,754,633.00	26,673,387,176.00	(2,046,367,457.00)	-7.13	Efisiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	254,608,600.00	192,569,300.00	(62,039,300.00)	-24.37	Efisiensi anggaran
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170,911,000.00</b>	<b>146,584,000.00</b>	(24,327,000.00)	-14.23	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,954,000.00	5,194,000.00	(4,760,000.00)	-47.82	Efisiensi anggaran
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160,957,000.00	141,390,000.00	(19,567,000.00)	-12.16	Efisiensi anggaran
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>84,711,000.00</b>	<b>68,925,250.00</b>	(15,785,750.00)	-18.63	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000.00	8,170,000.00	170,000.00	2.13	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,953,000.00	22,752,000.00	(5,201,000.00)	-18.61	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,682,500.00	1,541,250.00	(1,141,250.00)	-42.54	Efisiensi anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBDP	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
				Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100	7
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,793,500.00	9,080,000.00	(3,713,500.00)	-29.03	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,100,000.00	11,100,000.00	-	0.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22,182,000.00	16,282,000.00	(5,900,000.00)	-26.60	Efisiensi anggaran
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>181,000,000.00</b>	136,000,000.00	302.22	
	Pengadaan Mebel	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45,000,000.00	181,000,000.00	136,000,000.00	302.22	Bertambah untuk belanja alat elektronik (Laptop, printer)
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>482,056,000.00</b>	<b>482,056,000.00</b>	-	0.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	856,000.00	856,000.00	-	0.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325,200,000.00	325,200,000.00	-	0.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,000,000.00	156,000,000.00	-	0.00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,401,580,000.00</b>	<b>1,401,580,000.00</b>	-	0.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	483,000,000.00	483,000,000.00	-	0.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,780,000.00	77,780,000.00	-	0.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	840,800,000.00	840,800,000.00	-	0.00	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	-	<b>14,251,734.00</b>	#VALUE!	#VALUE!	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	14,251,734.00	#VALUE!	#VALUE!	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBDP	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
				Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100	7
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	14,251,734.00	#VALUE!	#VALUE!	bertambah untuk bayar utang paket fisik
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>777,576,150.00</b>	<b>620,158,607.00</b>	(157,417,543.00)	-20.24	
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	261,971,400.00	231,480,200.00	(30,491,200.00)	-11.64	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	34,578,600.00	18,569,200.00	(16,009,400.00)	-46.30	Efisiensi anggaran
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
	<b>Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota</b>	115,161,900.00	136,394,450.00	21,232,550.00	18.44	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	68,376,900.00	54,153,150.00	(14,223,750.00)	-20.80	Efisiensi anggaran
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	43,854,000.00	22,363,400.00	(21,490,600.00)	-49.00	Efisiensi anggaran
	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	349,939,250.00	277,861,107.00	(72,078,143.00)	-20.60	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	349,939,250.00	277,861,107.00	(72,078,143.00)	-20.60	Efisiensi anggaran
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	165,665,500.00	110,817,300.00	(54,848,200.00)	-33.11	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	43,660,550.00	25,449,200.00	(18,211,350.00)	-41.71	Efisiensi anggaran
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	122,004,950.00	85,368,100.00	(36,636,850.00)	-30.03	Efisiensi anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBDP	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
				Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100	7
4	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>45,316,000.00</b>	<b>18,908,000.00</b>	(26,408,000.00)	-58.28	
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	45,316,000.00	18,908,000.00	(26,408,000.00)	-58.28	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	45,316,000.00	18,908,000.00	(26,408,000.00)	-58.28	Efisiensi anggaran
5	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>49,219,900.00</b>	<b>25,277,300.00</b>	(23,942,600.00)	-48.64	
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	49,219,900.00	25,277,300.00	(23,942,600.00)	-48.64	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	49,219,900.00	25,277,300.00	(23,942,600.00)	-48.64	Efisiensi anggaran
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>452,680,600.00</b>	<b>289,089,400.00</b>	(163,591,200.00)	-36.14	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	452,680,600.00	289,089,400.00	(163,591,200.00)	-36.14	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452,680,600.00	289,089,400.00	(163,591,200.00)	-36.14	Efisiensi anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
7	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>16,426,250,720.00</b>	<b>26,454,328,886.00</b>	10,028,078,166.00	61.05	
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	8,156,621,600.00	14,738,880,730.00	6,582,259,130.00	80.70	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5,630,363,000.00	10,355,644,400.00	4,725,281,400.00	83.92	Bertambah untuk kegiatan BKK pada pengadaan alsintan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2,526,258,600.00	4,383,236,330.00	1,856,977,730.00	73.51	Bertambah untuk kegiatan BKK pada pengadaan alsintan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBDP	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
				Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100	7
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5,502,859,120.00	6,727,608,156.00	1,224,749,036.00	22.26	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,516,424,400.00	1,341,488,400.00	(174,936,000.00)	-11.54	Efisiensi anggaran
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2,468,640,720.00	3,975,389,756.00	1,506,749,036.00	61.04	Efisiensi anggaran
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	1,517,794,000.00	1,410,730,000.00	(107,064,000.00)	-7.05	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,766,770,000.00	4,987,840.00	(2,761,782,160.00)	-99.82	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,766,770,000.00	4,987,840.00	(2,761,782,160.00)	-99.82	Efisiensi anggaran
8	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>13,575,050,726.00</b>	<b>23,358,980,949.00</b>	9,783,930,223.00	72.07	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	13,575,050,726.00	23,358,980,949.00	9,783,930,223.00	72.07	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9,267,456,176.00	18,061,040,623.00	8,793,584,447.00	94.89	Bertambah untuk kegiatan BKK pada pengadaan paket fisik
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4,307,594,550.00	5,297,940,326.00	990,345,776.00	22.99	Bertambah untuk kegiatan BKK pada pengadaan paket fisik
9	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>638,661,835.00</b>	<b>512,679,000.00</b>	(125,982,835.00)	-19.73	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	436,421,835.00	417,329,000.00	(19,092,835.00)	-4.37	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	436,421,835.00	427,329,000.00	(9,092,835.00)	-2.08	Efisiensi anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBDP	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
				Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100	7
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	202,240,000.00	85,350,000.00	(116,890,000.00)	-57.80	
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	139,090,000.00	43,030,000.00	(96,060,000.00)	-69.06	Efisiensi anggaran
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	63,150,000.00	42,320,000.00	(20,830,000.00)	-32.98	Efisiensi anggaran
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>596,610,450.00</b>	<b>373,199,750.00</b>	(223,410,700.00)	-37.45	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	596,610,450.00	373,199,750.00	(223,410,700.00)	-37.45	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	596,610,450.00	373,199,750.00	(223,410,700.00)	-37.45	Efisiensi anggaran
10	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1,823,417,600.00</b>	<b>1,477,800,800.00</b>	(345,616,800.00)	-18.95	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1,823,417,600.00	1,477,800,800.00	(345,616,800.00)	-18.95	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,466,429,600.00	465,584,800.00	(1,000,844,800.00)	-68.25	Efisiensi anggaran
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	356,988,000.00	207,010,000.00	(149,978,000.00)	-42.01	Efisiensi anggaran
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	805,206,000.00	#VALUE!	#VALUE!	Bertambah untuk belanja BOP tenaga penyuluh sebanyak 137 org
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>65,875,589,214.00</b>	<b>82,347,414,152.00</b>	<b>16,471,824,938.00</b>	<b>25.00</b>	

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel perubahan anggaran, perencanaan dan penganggaran dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 mengalami beberapa penyesuaian pada setiap tahapan, mulai dari RKPD hingga APBD Perubahan pada tahap RKPD direncanakan 10 program, 21 kegiatan, dan 50 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 65.875.589.214, kemudian pada pergeseran I jumlah sub kegiatan menjadi 45 dengan peningkatan anggaran menjadi Rp 68.043.019.214, dimana adanya akibat penambahan anggaran untuk pembayaran utang paket fisik.

Selanjutnya pada pergeseran II jumlah sub kegiatan disesuaikan menjadi 46 dengan anggaran kembali sebesar Rp 65.875.589.214 yang dipengaruhi penambahan sub kegiatan bidang penyuluhan (BOP DAK Non Fisik) serta efisiensi kegiatan rutin SKPD. Sedangkan pada tahap KUA PPAS, struktur program dan kegiatan tetap, namun anggaran menurun menjadi Rp 61.779.700.264 yang mengakibatkan pengurangan anggaran kegiatan rutin. Selanjutnya pada tahap APBD perubahan tahun 2025 anggaran meningkat signifikan menjadi 82.347.414.152 seiring penambahan anggaran paket fisik dan kegiatan pandu juara (BKK), dan pada tahap APBD perubahan telah ditetapkan secara final sebanyak 10 program, 22 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan pagu total anggaran Rp 82.347.414.152.- (Delapan Dua Miliar Tiga Empat Tujuh Empat Empat Belas Ribu Satu Lima Dua Rupian).

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di sektor pertanian dan ketahanan pangan, yang sejalan dengan visi pembangunan daerah kabupaten luwu timur. Melalui pelaksanaan program tersebut, dinas pertanian dan ketahanan pangan berupaya meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan perani dan masyarakat.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan di dukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, baik melalui belanja operasional maupun belanja modal. Berbagai kegiatan strategis telah dilaksanakan, antara lain penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani, pendampingan dan penyuluhan pertanian, serta penguatan cadangan dan distribusi pangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sektor pertanian.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal akibat penyesuaian anggaran, efisiensi belanja, serta dinamika kondisi lapangan, namun secara keseluruhan capaian kinerja program dan kegiatan tetap dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, serta mendukung terwujudnya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di kabupaten luwu timur.

Adapun rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan rencana strategis (Renstra) dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan bupati. Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 dalam melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 65.875.589.214,- (Enam Lima Milyar Delapan Tujuh Lima Juta Lima Delapan Sembilan Ribu Dua Empat Belas Rupiah), selanjutnya melalui mekanisme dengan perubahan APBD, anggaran dinas pertanian dan ketahanan pangan menjadi Rp 82.347.414.152 (Delapan Dua Milyar Tiga Empat Tujuh Juta Empat Empat Belas Ribu Seratus Lima Dua Rupiah), dengan perubahan ini dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan di tahun 2025.



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen DPA tahun 2025, dinas pertanian dan ketahanan pangan melaksanakan 10 program, 22 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Secara garis besar untuk semua realisasi kegiatan yang di kelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dapat di tinjau pada table berikut :

Tabel 3.1.

Pelaksanaan urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak lanjut Rekomendasi LKPJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pangan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	49.5	34,4			
				<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100.00				
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	100.00				
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	100.00	100.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1,00	1,00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kot	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	100.00			
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15.00	15.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	100.00			
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	100.00			
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1.00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	100.00			
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	100.00			

Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
---	------	------	-----------	--

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu timur, diolah tahun 2026

Tabel 3.2.  
Pelaksanaan Urusan Pilihan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
	Pertanian	Dinas pertanian dan ketahanan pangan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi tanaman pangan 5.608,18 Ton/Tahun	9.749,03 Ton/Tahun			
					Peningkatan produksi komoditas peternakan 60,35 Ton/Tahun	2.859,54 Ton/Tahun			
					Peningkatan Produksi Tanaman hortikultura 832,2 Ton/Tahun	-468.759 Ton/Tahun			
					Peningkatan produksi tanaman perkebunan 6.169,68 Ton/Tahun	136.273,84 Ton/Tahun			
				Pengawasan Penggunaan Sarana	100%	100%			

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)**  
**Tahun 2025**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
				Pertanian					
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan	dari target 57 unit pengadaan alsintan yang terealisasi hanya 12 unit berupa traktor roda dua 8 unit, traktor roda empat 1 unit, traktor roda crawler 1 unit, dan pompa air 3 inchi 2 unit dan untuk pengadaan alsintan yang tidak terealisasi karena kesalahan nomenklatur (dana BKK) (PSP) akan dialihkan anggarannya ke Desa agar alsintan tersebut dapat dikelola oleh BUMDES (PSP) - Penyaluran pupuk subsidi pada bulan November 2025 dari alokasi 36.240 ton realisinya hanya 29.914,65 ton atau sebesar 82,55%, dikarenakan kurangnya penebusan pada pupuk organik dan laporan penyaluran pupuk bulan desember masih dalam proses verifikasi. (PSP) - pengadaan benih padi sebanyak 94.100 kg (3.764 Ha) yang pengadaannya melalui anggaran BKK tidak terlaksana karena stok benih bersertifikat tidak ada (telah dilakukan komunikasi dengan beberapa penyedia benih) (TPH) - pengadaan benih jagung untuk desa tampinna sebanyak 975 kg (65 Ha) yang melalui dana BKK tidak	akan dialihkan anggarannya ke desa agar alsintan tersebut dapat di kelola oleh BUMDES (PSP) - monitoring alsintan senantiasa dilakukan untuk memastikan efektifitas penggunaan alsintan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (PSP) - pengadaan benih/bibit yang berasal dari BKK di alihkan pengalokasiannya melalui BUMDES (TPH)"	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
							terlaksana karena adanya perubahan komoditi unggulan di desa tampinna. (TPH) - pengadaan pisang cavendis tidak terlaksana karena tidak terdapat stok bibit yang bersertifikat (benih belum bersertifikat)		
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	6 Laporan	untuk kegiatan intensifikasi tanaman lada dengan luas lahan 15,59 Ha dengan jumlah kebutuhan bibit sebanyak 25.104 pohon hanya terealisasi sebanyak 20.000 pohon atau setara dengan 12,54 Ha dikarenakan bibit lada yang siap tanam hanya tersedia 20.000 pohon. (BUN) - untuk kegiatan pandu juara Kakao berupa ekstensifikasi tanaman kakao seluas 112,5 Ha tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan di kelola oleh BUMDESMA - terdapat pengalokasian belanja untuk kegiatan ekstensifikasi pandu juara kakao tidak terealisasi (Terlaksana). (BUN). - pengadaan combine harvester sebanyak 5 unit dan corn sheller sebanyak 7 unit (Alsintan pasca panen) yang direncanakan melalui kegiatan pandu juara (BKK) tidak terlaksana karena terdapat	untuk kegiatan intensifikasi tanaman lada dengan luas lahan 15,59 Ha dengan jumlah kebutuhan bibit sebanyak 25.104 pohon hanya terealisasi sebanyak 20.000 pohon atau setara dengan 12,54 Ha dikarenakan bibit lada yang siap tanam hanya tersedia 20.000 pohon. (BUN) - untuk kegiatan pandu juara Kakao berupa ekstensifikasi tanaman kakao seluas 112,5 Ha tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan di kelola oleh BUMDESMA - terdapat pengalokasian belanja untuk kegiatan ekstensifikasi pandu	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
							kesalahan nomenklatur. (TPH) - pendampingan terhadap kegiatan pandu juara kakao yang akan dilakukan ekstensifikasi untuk lahan kakao tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan dikelola oleh BUMDESMA (BUN) - Belanja alsintan pasca panen yang bersumber dari dana BKK tidak di realisasikan .	juara kakao tidak terealisasi (Terlaksana). (BUN). - pengadaan combine harvester sebanyak 5 unit dan corn sheller sebanyak 7 unit (Alsintan pasca panen) yang direncanakan melalui kegiatan pandu juara (BKK) tidak terlaksana karena terdapat kesalahan nomenklatur. (TPH) - pendampingan terhadap kegiatan pandu juara kakao yang akan dilakukan ekstensifikasi untuk lahan kakao tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan dikelola oleh BUMDESMA (BUN) - Belanja alsintan pasca panen yang bersumber dari dana BKK tidak di realisasikan .	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	100%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
				Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	3 Dokumen	untuk kegiatan intensifikasi tanaman lada dengan luas lahan 15,59 Ha dengan jumlah kebutuhan bibit sebanyak 25.104 pohon hanya terealisasi sebanyak 20.000 pohon atau setara dengan 12,54 Ha dikarenakan bibit lada yang siap tanam hanya tersedia 20.000 pohon. (BUN) - untuk kegiatan pandu juara Kakao berupa ekstensifikasi tanaman kakao seluas 112,5 Ha tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan di kelola oleh BUMDESMA - terdapat pengalokasian belanja untuk kegiatan ekstensifikasi pandu juara kakao tidak terealisasi (Terlaksana). (BUN)	Dilakukan evaluasi kegiatan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. - kegiatan pandu juara kakao akan dilaksanakan oleh BUMDESMA	
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	1 laporan	1 laporan		-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Laporan	0 Laporan	#REF!	#REF!	
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ekor	0 Ekor	pengadaan benih/bibit ternak di batalkan karena pengadaannya akan di alihkan pada program prioritas pemerintah daerah yaitu pembangunan dan pengembangan desa terpadu sektor peternakan yang akan di kelola oleh BUMDES - tidak di realisasikan karena pengadaan bibit ternak di batalkan dan di lakukan refokusing anggaran pada program prioritas pemerintah daerah. - anggaran pengadaan bibit ini akan digunakan dalam persiapan program prioritas pembangunan desa terpadu di sektor peternakan pada tahun anggaran 2026	:pengadaanya akan di alihkan ke BUMDES	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	83,17 %	83,17 %			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pembangunan prasarana pertanian 1 Laporan	1 Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 98 Unit	98 Unit	adanya 1 paket kegiatan fisik yang tidak dapat di realisasikan sehingga menjadi utang/retensi	Akan daapt dibayarkan di tahun berikutnya	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 32 Unit	32 Unit	Realisasi fisik 100% sedangkan rendahnya realisasi keuangan dikarenakan masih adanya paket pekerjaan yang belum terbayarkan		
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>			
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan penjaminan kesehatan hewan 1 Laporan	1 Laporan			
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 4 Laporan	4 Laporan	anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa dari honorarium petugas statistik peternakan yang di bayarkan pada 38 petugas desa yang telah ditetapkan namun belum mampu melaksanakan pendataan 6 format laporan yang di sediakan.		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner 1 Laporan	1 Laporan			
				Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi 2 Orang	2 Orang	anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi		
				Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa anggaran perjalanan dinas dan honorarium narasumber		
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase penanganan bencana pertanian 100 %	95%			
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengendalian bencana pertanian 100 %	100%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.225 Ha	2.747,87 Ha	tingginya curah hujan dan adanya dampak perubahan iklim sehingga mempengaruhi serangan OPT dan terdapat lahan terserang OPT seluas 1.719,72 Ha, Puso 166,85 akibat serangan hama tikus dan penggerek batang (TPH) - pada sub kegiatan ini seluruh anggarannya (AUTP) di kembalikan di anggaran perubahan karena bantuan premi sebanyak 80% sudah tidak di subsidi lagi dari kementerian pertanian karena adanya refocusing anggaran. (PSP) - masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi dari belanja bahan kimia (belerang) serta anggaran makan minum (TPH)	dilakukan pengamatan dan pengendalian seluas 1.552,87 Ha (TPH)	
				<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	11 Unit	TAdanya silpa terutama pada sisa belanja ATK, Belanja cetak dan cover, belanja bahan komputer dan lain-lain, bibit tanaman karena adanya selisih harga satuan DPA dengan e-katalog. - anggaran yang belum terealisasi dari belanja bibit tanaman di pemanfaatan lahan pekarangan kantor spesifikasi timbunan di sebabkan galian timbunan galian C, dan media tanamnya tidak ada - anggaran yang belum terealisasi dari belanja bibit ikan di pemanfaatan pekarangan BPP tomoni timur, karna tidak Aman		
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	126 Unit	126 Unit	terdapat pada belanja perjalanan dinas dan sisa belanja Bahan Lainnya, karena adanya selisih harga satuan DPA dengan e-katalog		
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	137 org	135 Orang	terdapat 2 orang yang tdk direalisasikan dikarenakan yang bersangkutan sudah terangkat P3k		

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, data diolah tahun 2026

Tabel 3.3.  
Pelaksanaan Urusan Penunjang  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak lanjut Rekomendasi LKPJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penunjang	Dinas pertanian dan ketahanan pangan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	96.91 %				
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100.00</b>				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
				Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%				
				<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	208 org/bulan	271 org/bulan	Adanya kenaikan capaian kinerja dikarenakan adanya tambahan pegawai yakni CPNS sebanyak 39 org dan PPPK sebanyak 26 org,		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.00	16.00		Persentase laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	



<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%				
Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	12.00	9.00	Terdapat jenis belanja yang direncanakan namun tidak dapat direalisasikan dikarenakan paketnya tdk ready	Disesuaikan dengan bahan yang ready	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	11.00	11,00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	98.9%				
<b>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.00	5.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.00	3.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
Penyediaan bahan logistik kantor	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.00	54.00	Terdapat jenis bacaan yang direncanakan namun tidak dapat direalisasikan dikarenakan paketnya tdk ready	Disesuaikan dengan bahan bacaan yang masuk	
Fasilitasi kunjungan tamu	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100.00				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5.00	5.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai	

atau Bangunan Lainnya			target	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100.%</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	12.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	12.00	12.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
Penyediaan jasa surat menyurat	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100.%</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.00	141.00	Terdapat beberapa kendaraan tidak di kerjakan karena kondisi kendaraan tersebut masih baik	Tidak di usulkan untuk dilakukan perbaikan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.00	64.00	Terdapat peralatan dan mesin lainnya tidak direalisasikan dikarenakan masih dapat digunakan.	Tidak dikerjakan pada peralatan mesin yang masih bagus
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.00	8.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK sesuai target

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, data diolah tahun 2026

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tiga urusan utama, yaitu urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian serta urusan penunjang urusan pemerintahan. Urusan bidang pangan difokuskan pada upaya peningkatan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pemantauan distribusi dan harga pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, serta pencegahan kerawanan pangan dan gizi. Untuk urusan pemerintahan bidang pertanian itu diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan yang meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, melalui pembinaan petani dan kelompok tani, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, penerapan teknologi pertanian, serta pengendalian hama dan penyakit. Sementara itu urusan penunjang urusan pemerintahan mencakup dukungan administrasi, perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pelaporan kinerja, serta aset pengelola aset dan data, yang bertujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dinas dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan selaras dengan visi pembangunan kabupaten luwu timur menuju daerah yang maju dan sejahtera.

### **3.2. Kebijakan Strategis yang di tetapkan**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian. Kebijakan ini di fokuskan pada penguatan ketersediaan, akses, dan keamanan pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Di bidang oertanian, kebijakan strategis diarahkan pada peningkatan produkstivitas dan daya saing komoditas unggulan melalui pengembangan sarana dan prasarana pertanian, penerapan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Selain itu dinas juga mendorong penguatan sistem agribisnis dan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Kebijakan strategis lainnya, adalah penguatan tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program, sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berjalan efektif, terintegrasi, dan selaras dengan visi pembangunan daerah menuju luwu timur maju dan sejahtera. Adapun kebijakan strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5  
Kebijakan Strategis pada Urusan  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang di Selesaikan	
			Permasalahan	Tujuan
1	Penguatan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan	Peraturan bupati tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah	Kerawanan pangan diwilayah tertentu serta fluktuasi pasokan pangan	Menjamin ketersediaan pangan yang cukup, merata dan berkelanjutan
2	Penguatan cadangan pangan dan stabilisasi pasokan serta harga pangan	Keputusan bupati tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah	Ketidakstabilnya harga pangan dan keterbatasannya stok pada kondisi darurat	Menjaga kestabilan harga dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
3	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian unggulan	Instruksi Bupati tentang percepatan peningkatan produksi pertanian	Rendahnya produktivitas pertanian dan keterbatasan sarana pertanian	Meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani
4	Penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani	Keputusan Bupati tentang pembinaan dan penguatan kelembagaan petani	Lemahnya kelembagaan petani dan rendahnya SDM pertanian	Meningkatkan kemandirian dan daya saing petani
5	Pengembangan nilai tambah produk pertanian berbasis potensi lokal	Peraturan Bupati tentang pengembangan agribisnis dan hilirisasi produk pertanian	Rendahnya nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian	Meningkatnya nilai ekonomi produk pertanian dan kesejahteraan masyarakat/petani
6	Penguatan tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	Keputusan Bupati tentang peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data diolah tahun 2026

### 3.3. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik dan akuntabel. Pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian serta urusan penunjang perangkat daerah. Realisasi belanja secara umum telah digunakan sesuai rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Alokasi anggaran dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan daerah, pembinaan petani dan kelompok tani, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, serta pelaksanaan kegiatan penunjang.

Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum optimal akibat penyesuaian kebijakan dan dinamika pelaksanaan dilapangan, secara keseluruhan realisasi keuangan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju luwu timur yang maju dan sejahtera.

Adapun realisasi keuangan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6  
Realisasi Keuangan pada urusan  
Dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	82,347,414,152.00	61,743,619,026.00	74.98		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29,202,739,726.00	27,991,111,234.00	95.85		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,490,000.00	75,040,862.00	98.11		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,319,000.00	37,568,686.00	98.04		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,001,000.00	1,862,358.00	93.07		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,433,000.00	2,271,003.00	93.34		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,737,000.00	33,338,815.00	98.82		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,865,956,476.00	26,178,793,329.00	97.44		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,673,387,176.00	26,001,174,849.00	97.48		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	192,569,300.00	177,618,480.00	92.24		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146,584,000.00	77,140,788.00	52.63		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,194,000.00	4,438,941.00	85.46		

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	141,390,000.00	72,701,847.00	51.42	terdapat anggaran tidak direalisasikan dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan kegiatan yang berdampak pada perubahan jadwal pelaksanaan kegiatannya, dengan keterbatasan waktu pelaksanaannya ditahun ini	Menyesuaikan metode pelaksanaan bimbingan teknis, serta melakukan koordinasi lintas bidang dan pemangku kepentingan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358,014,650.00	345,267,284.00	96.44		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,170,000.00	7,925,000.00	97.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,752,000.00	21,397,277.00	94.05		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,541,250.00	1,250,000.00	81.10		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	9,080,000.00	3,192,900.00	35.16	Adanya kebijakan efisiensi anggaran serta penerapan digitalisasi dokumen dalam pelaksanaan kegiatan, sebagian kebutuhan cetak dialihkan ke bentuk elektronik sehingga anggaran yang dialokasikan tidak seluruhnya direalisasikan.	melakukan penyesuaian perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan riil.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,100,000.00	10,090,000.00	90.90		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,282,000.00	16,115,000.00	98.97		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289,089,400.00	285,297,107.00	98.69		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181,000,000.00	160,098,999.00	88.45		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181,000,000.00	160,098,999.00	88.45		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490,574,000.00	306,561,935.00	62.49		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	724,000.00	639,027.00	88.26		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325,200,000.00	141,272,908.00	43.44	Terdapat anggaran persediaan dimana anggaran yang direalisasikan sesuai pemakaian listrik terhadap 15 unit kantor pada setiap bulan	melakukan penyesuaian perencanaan anggaran sesuai kebutuhan riil di 15

### Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP)

Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN
					berjalan	unit kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164,650,000.00	164,650,000.00	100.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,373,210,000.00	1,133,505,144.00	82.54		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	493,300,000.00	296,342,404.00	60.07	Terdapatnya kondisi kendaraan masih layak pakai sehingga tidak seluruh randis yang direncanakan pemeliharaan dapat dilaksanakan	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran pemeliharaan berdasarkan kondisi riil kendaraan dinas
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,110,000.00	32,950,000.00	84.25		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	840,800,000.00	804,212,740.00	95.65		
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	14,251,734.00	14,251,734.00	100.00		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14,251,734.00	14,251,734.00	100.00		
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14,251,734.00	14,251,734.00	100.00		
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	620,158,607.00	598,416,739.00	96.49		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	231,480,200.00	218,184,267.00	94.26		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	18,569,200.00	17,680,063.00	95.21		



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	136,394,450.00	124,471,107.00	91.26		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	54,153,150.00	53,785,828.00	99.32		
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	22,363,400.00	22,247,269.00	99.48		
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	277,861,107.00	277,569,922.00	99.90		
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	277,861,107.00	277,569,922.00	99.90		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	110,817,300.00	102,662,550.00	92.64		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	25,449,200.00	25,198,473.00	99.01		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	85,368,100.00	77,464,077.00	90.74		
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	18,908,000.00	18,018,049.00	95.29		
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	18,908,000.00	18,018,049.00	95.29		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	18,908,000.00	18,018,049.00	95.29		
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25,277,300.00	23,444,868.00	92.75		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25,277,300.00	23,444,868.00	92.75		
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25,277,300.00	23,444,868.00	92.75		
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	26,454,328,886.00	8,011,044,171.00	30.28		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14,738,880,730.00	5,740,657,450.00	38.95		

### Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP)

Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10,355,644,400.00	4,162,029,723.00	40.19	- Terdapatnya penyaluran pupuk subsidi pada bulan november 2025 dari alokasi 36.240 ton realisasinya hanya 29.914,65 ton atau sebesar 82,55% dikarenakan kurangnya penebusan pada pupuk tersebut. '- Pengadaan benih padi di anggaran perubahan tidak direalisasikan karena stok benih bersertifikasi tidak tersedia. '- Terdapat belanja paket alsintan yang tidak direalisasikan karena kesalahan alokasi/nomenklatur yang mana jenis belanja tersebut dapat dikelola oleh bumdes,	Anggaran pandu juara Akan dilaihnkan ke desa agar pengadaan tersebut dapat dikelola oleh Bumdes
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4,383,236,330.00	1,578,627,727.00	36.02		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6,727,608,156.00	2,270,386,721.00	33.75		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,341,488,400.00	664,376,591.00	49.53	Terdapat pengalokasian belanja untuk kegiatan ekstensifikasi tanaman kakao pada kegiatan pandu juara anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan karena alokasi penggunaan anggaran itu dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa yang akan dikelola oleh Bumdesma	Anggaran pandu juara Akan dialihkan ke desa agar pengadaan tersebut dapat dikelola oleh Bumdesma
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	1,410,730,000.00	1,118,743,660.00	79.30		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4,987,840,000.00	-	0.00		
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4,987,840,000.00	-	0.00		
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	23,358,980,949.00	22,772,970,560.00	97.49		

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN
	PERTANIAN					
	Pembangunan Prasarana Pertanian	23,358,980,949.00	22,772,970,560.00	97.49		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18,061,040,623.00	17,550,311,901.00	97.17		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5,297,940,326.00	5,222,658,659.00	98.58		
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	512,679,000.00	456,006,592.00	88.95		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	427,329,000.00	386,172,092.00	90.37		
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	427,329,000.00	386,172,092.00	90.37		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	85,350,000.00	69,834,500.00	81.82		
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	43,030,000.00	31,189,400.00	72.48		
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	373,199,750.00	290,751,866.00	77.91		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	373,199,750.00	290,751,866.00	77.91		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	373,199,750.00	290,751,866.00	77.91		
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,477,800,800.00	1,282,306,106.00	86.77		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			86.77		

### **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP)**

**Tahun 2025**

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN
		1,477,800,800.00	1,282,306,106.00			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	465,584,800.00	342,049,671.00	73.47		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	207,010,000.00	188,331,435.00	90.98		
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	805,206,000.00	751,925,000.00	93.38		
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>82,347,414,152.00</b>	<b>61,743,619,026.00</b>	<b>74.98</b>		

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data diolah tahun 2026

### 3.4. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian di kabupaten luwu timur. Dengan adanya kerjasama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan itu dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, serta dapat membangun sinergi dan kolaborasi yang efektif, serta dapat meningkatkan hasil dari setiap program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penting adanya kerjasama ini demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Melalui kerjasama daerah, diharapkan dapat dilakukan pertukaran pengetahuan, pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan sistem agribisnis, serta memperluas akses pasar bagi produk pertanian. Selain itu, kerjasama juga menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pertanian, memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama daerah di bidang pertanian merupakan langkah strategis bagi dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung terwujudnya visi kabupaten luwu timur maju dan sejahtera.

Tabel 3.7

Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Dilaksanakan Sampai dengan Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Instansi Mitra MoU	Tanggal Mou	Nomor MoU	Perihal MoU
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	BPJS Ketenagakerjaan	14 Oktober 2024	100.3.7.1/41/PKS/PEM-LT/X/2024	Kepersertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit rakyat kabupaten luwu timur

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur telah menjalin kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Adapun ruang lingkup kerjasama difokuskan pada keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit rakyat di kabupaten luwu timur. Kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sektor pertanian, perkebunan dan khususnya pekerja sawit rakyat.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerjassama ini adalah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja perkebunan sawit rakyat guna meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu juga kerjasama ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan usaha perkebunan rakyat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja di kabupaten luwu timur.

Tabel 3.8.

Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Kerjasama Antar Daerah

No	SKPD	Perihal MoU	Capaian Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepersertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit rakyat kabupaten luwu timur	Terlaksananya kerjasama antar dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur dengan BPJS ketenagakerjaan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai dasar pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit rakyat.	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur pada tahun 2025 telah melaksanakan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga melalui keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit rakyat. Pelaksanaan kerjasama ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tidak diperlukan solusi atau tindak lanjut, karena kerjasama ini berjalan efektif dan memberikan manfaat dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja di sektor perkebunan.

### 3.5. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan proses penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diusulkan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan adanya tindak lanjut ini berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur memiliki cacatan rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk tahun anggaran sebelumnya, Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Rekomendasi RKPD dan Tindaklanjut Tahun N-1 pada Urusan  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang di selesaikan	OPD Penanggung jawab
1.	Perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemberian bantuan terhadap kelompok-kelompok tani	Dinas pertanian dan ketahanan pangan dengan melalui penguatan mekanisme perencanaan, penyaluran, dan monitoring bantuan. Pengawasan dilakukan mulai dari proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, hingga pemantauan pemanfaatan bantuan dilapangan, selain itu juga dilakukan pendampingan dan evaluasi kepada kelompok tani secara berkala untuk memastikan bantuan pertanian tersebut tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal dan tepat guna, serta sesuai dengan kebutuhan petani, dengan adanya bantuan tersebut itu mendukung peningkatan produktifitas serta kesejahteraan petani di kabupaten luwu timur.	Meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan kepada kelompok tani di kabupaten luwu timur, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan, ketidak tepatan sasaran dan penyalahgunaan bantuan. pemanfaatan bantuan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Diolah tahun 2026

### 3.6. Penghargaan

Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 tidak mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pertanian.

Tabel 3.10  
Penghargaan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan

No.	SKPD	Nama Penghargaan	Partisipasi dalam Bidang	Pemberi Penghargaan
-1	-2	-3	-4	-5
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak ada	-	-

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data diolah tahun 2026

Pada tabel diatas di mana dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025 tidak memperoleh penghargaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi ini tidak serta merta mencerminkan rendahnya kinerja perangkat daerah, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain belum terpenuhinya seluruh indikator dan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh lembaga pemberi penghargaan,

Meskipun demikian, seluruh program dan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berorientasi pada pencapaian visi misi kabupaten luwu timur luwu timur maju dan sejahtera. Kedepan, dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja, meningkatkan inovasi, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat meraih penghargaan pada tahun-tahun berikutnya.

## BAB IV



## CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

### 4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam tugas pembantuan, melaksanakan kegiatan dengan dasar hukum dari pelaksanaan tugas pembantuan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada ketentuan hukum sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pertanian  
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Dasar Hukum Pelaksanaan TP	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	2	3	4
1	DIPA PROPINSI DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN No. SP DIPA 018.08.4.199133/2025	Kementerian Pertanian Cq. Ditjen Sarana dan Prasarana	Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data diolah tahun 2026

Adapun penyelenggaraan kegiatan yang diperoleh atas tugas pembantuan dari provinsi (APBN) itu terdapat dari kementerian pertanian Cq. Dirjen Sarana dan prasarana, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan bidang prasarana dan sarana berupa program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, berupa pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian pra panen pada sub sektor tanaman pangan, Fasilitas pupuk dan pestisida, serta perlindungan dan penyediaan lahan dalam hal ini adalah persediaan kawasan cetak, tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh bidang prasarana dan sarana dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur..

Tabel 4.2

Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIPA PROPINSI DITJEN PRASARANA A DAN SARANA PERTANIAN No. SP DIPA 018.08.4.199 133/2025	<b>BIDANG PRASARANA DAN SARANA</b>								
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	185,130,000	7,800,000	4.21					Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupten Luwu timur
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	15,000,000							
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Base Line)	-				1	Kegiatan	1	
	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)	-				1	Kegiatan	1	
	Persiapan, Monev, dan Pelaporan (QW Intensifikasi)	15,000,000							
	LUWU TIMUR	-							
	<u>Belanja Bahan</u>	1,200,000							

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Penggandaan Dokumen Database/Inventarisasi Alsintan dan UPJA	700,000				1	Pkt	1	
	- Fotocopy dokumen, surat, dll	100,000				500	Lbr	500	
	- Penggandaan Petunjuk Pelaksanaan	400,000				20	Ekpl	20	
	<b><u>Belanja Honor Output Kegiatan</u></b>	<b>3,600,000</b>							
	- Honor Petugas input BAST Online dan Pemanfaatan Alsintan	1,800,000				6	OB	6	
	- Honor Petugas Pemeriksa	1,800,000				6	OB	6	
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>	<b>7,200,000</b>							
	- Monitoring Pemanfaatan Alsintan dan pengumpulan data/informasi Alsintan dan UPJA	3,200,000				8	OH	8	
	- Pendampingan, verifikasi/monitoring Alsintan dan pembinaan kelembagaan UPJA	4,000,000				8	OP	8	
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u></b>	<b>3,000,000</b>							
	- Koordinasi Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA	600,000				2	OH	2	
	- Koordinasi Penyaluran/BAST dan Laporan Pemanfaatan Alsintan	900,000				3	OH	3	

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Pemanfaatan, Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan	600,000				2	OH	2	
	- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Penyaluran Alsintan/BAST dan Laporan	900,000				3	OH	3	
	<b>Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</b>	<b>155,330,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3.86</b>					
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat [ Base Line ]</b>	<b>155,330,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3.86</b>					
	<b>Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi</b>	<b>125,330,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4.79</b>					
	<b>Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi</b>	<b>31,170,000</b>							
	<b>LUWU TIMUR</b>	-							
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>	<b>8,770,000</b>							
	- ATK/Fotocopy/Komputer Supplies	1,210,000				11	Pkt	11	
	- Dukungan Pulsa Tim Pendataan, Entry, dan Updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi	6,930,000				66	OB	66	
	- Dukungan Pulsa Tim Admin Kabupaten	630,000				6	OB	6	
	<b><u>Belanja Honor Ouput Kegiatan</u></b>	<b>18,000,000</b>							
	- Honor Admin Kabupaten/Kota	1,500,000				6	OB	6	

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)**

**Tahun 2025**

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Honor Tim Pendataan, Entry, dan Updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi	16,500,000				66	OB	66	
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>	<b>4,400,000</b>							
	- Pengawasan/monitoring/koordinasi pendataan penerima pupuk bersubsidi	4,400,000				11	OP	11	
		<b>94,160,000</b>	<b>6,000,000</b>						
	<b>Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi</b>								
	<b>LUWU TIMUR</b>								
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>	<b>25,410,000</b>							
	- Dukungan Pulsa Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan/Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani	25,410,000				242	OB	242	
	<b><u>Belanja Honor Ouput Kegiatan</u></b>	<b>68,750,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>8.73</b>					
	- Honor Tim Pembina Kabupaten	8,250,000	750,000	9.09		33	OP	33	
	- Honor Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani	60,500,000	5,250,000	8.68		242	OP	242	
	<b>Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestsida</b>	<b>30,000,000</b>				<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)**

**Tahun 2025**

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persiapan, Monev, dan Pelaporan	4,000,000							
	LUWU TIMUR								
	<u>Belanja Bahan</u>	1,000,000							
	- Penjilidan dan Penggandaan Laporan	1,000,000				2	Pkt	2	
	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>	1,000,000							
	- Pengiriman Laporan	800,000				8	Pkt	8	
	- Pengiriman Laporan	200,000				2	Pkt	2	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	2,000,000							
	- Konsultasi ke Provinsi	2,000,000				2	OK	2	
	<b>Pelaksanaan Kegiatan</b>	<b>26,000,000</b>							
	LUWU TIMUR								
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	26,000,000							
	- Monitoring dan Pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida	12,500,000				25	OH	25	
	- Identifikasi Peredaran dan Penggunaan dan Pestisida di kios dan di tingkat Kelompok Tani ( Petani )	13,500,000				27	OH	27	
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>14,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>12.16</b>					

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP)**

**Tahun 2025**

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP	14,800,000	1,800,000	12.16		1.0	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.0	
	Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal [ Base Line ]					1.0	Dokumen	1.0	
	Layanan Manajemen Keuangan	14,800,000	1,800,000	12.16					
	Layanan Manajemen Keuangan								
	KAB. LUWU TIMUR								
	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>	10,800,000	1,800,000	16.67					
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar )	7,980,000	1,330,000	16.67		6	OB	6	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran ( pagu dana di atas Rp2,5 s.d. Rp5 miliar )	2,820,000	470,000	16.67		6	OB	6	
	<u>Belanja Bahan</u>	2,000,000							
	- ATK	2,000,000				1	THN	1	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	2,000,000							
	- Koordinasi dan Konsultasi ke provinsi	2,000,000				2	OP	2	

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)**

**Tahun 2025**

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BIDANG PRASARANA DAN SARANA</b>								
DIPA PROPINSI DITJEN PRASARAN A DAN SARANA PERTANIAN No. SP DIPA - 018.13.4.691 367/2025	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>70,223,350,000</b>	<b>8,664,377</b>	<b>0.01</b>					
	<b>Perlindungan dan Penyediaan Lahan</b>	<b>70,223,350,000</b>	<b>8,664,377</b>	<b>0.01</b>					
	<b>Prasarana Pengembangan Kawasan (Base Line)</b>	<b>70,223,350,000</b>	<b>8,664,377</b>	<b>0.01</b>					
	<b>Cetak Sawah (QW)</b>	<b>70,223,350,000</b>	<b>8,664,377</b>	<b>0.01</b>					
	<b>Persiapan (QW Eksensifikasi Cetak Sawah)</b>	<b>81,340,000</b>	<b>3,296,000</b>	<b>4.05</b>					
	<b>Kabupaten Luwu Timur</b>	<b>16,234,000</b>							
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>								
	- Konsumsi	6,970,000				82	OK	82	
	- Pencetakan Peta, Penggandaan Buku, Bahan Rapat dll	9,230,000				71	Kali	71	
	- Selisih	34,000				1	Kali	1	
	<b><u>Belanja Sewa</u></b>	<b>11,592,000</b>	<b>3,296,000</b>	<b>28.43</b>					
	- Sewa Kendaraan	6,592,000	3,296,000	<b>50.00</b>		8	Hari	8	
	- Sewa Drone	5,000,000				1	Hari	1	
	<b><u>Belanja Jasa Profesi</u></b>	<b>2,400,000</b>							



NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Honor Narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus/FGD (Setara Eselon II)	1,400,000				1	OJ	1	
	- Honor Narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus/FGD (Setara Eselon III)	1,000,000				1	OJ	1	
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>	<b>35,934,000</b>							
	> <u>Perjalanan Koordinasi ke Pusat dari Provinsi</u>	15,894,000							
	- Uang Harian	3,180,000				6	OH	6	
	- Tiket PP	9,794,000				2	OH	2	
	- Penginapan	2,920,000				4	OK	4	
	> <i>Identifikasi dan sosialisasi kegiatan Cetak Sawah QW Provinsi Sulawesi Selatan</i>	20,040,000							
	- Uang Harian	6,880,000				32	OH	32	
	- Transport	4,160,000				8	OK	8	
	- Bantuan Transport Kabupaten	9,000,000				60	OH	60	
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u></b>	<b>15,180,000</b>							
	> <i>Pertemuan Koordinasi Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian</i>								

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Transport	7,800,000				15	OK	15	
	- Uang Harian	1,425,000				15	OH	15	
	- Pertemuan Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah	5,955,000				15	OH	15	
	Konstruksi ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )	70,000,000,000							
	KABUPATEN LUWU TIMUR								
	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	70,000,000,000							
	- Konstruksi Cetak Sawah ( 1300 Ha )	45,500,000,000				1,300	Ha	1,300	
	700 Ha )	24,500,000,000				700	Ha	700	
	Monev dan Pelaporan ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )	122,010,000	5,368,377	4.40					
	KABUPATEN LUWU TIMUR								
	<u>Belanja Bahan</u>	34,511,000	5,368,377	15.56					
	- Konsumsi	14,195,000	1,250,000	8.81		167	OK	167	
	- Pencetakan Peta, Penggandaan buku, Bahan Rapat dll	20,280,000	4,118,377	20.31		156	Kali	156	
	- Selisih	36,000				1	Kali	1	

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Belanja Sewa</u></b>	<b>36,536,000</b>							
	- Sewa Kendaraan	11,536,000				14	Hari	14	
	- Sewa Drone	25,000,000				5	Hari	5	
	<b><u>Belanja Jasa Profesi</u></b>	<b>1,000,000</b>							
	- Honor Narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus/FGD ( Setara eselon III )	1,000,000				1	OJ	1	
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>	<b>21,627,000</b>							
	> Perjalanan Koordinasi ke Pusat dari Provinsi	7,647,000							
	- Uang Harian	1,290,000				3	OH	3	
	- Tiket PP	4,897,000				1	OK	1	
	- Penginapan	1,460,000				2	OH	2	
	> Pemantauan dan evaluasi kegiatan Cetak Swah QW	13,980,000							
	- Uang Harian	7,740,000				36	OH	36	
	- Transport	6,240,000				12	OK	12	
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u></b>	<b>28,336,000</b>							

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Transport	14,560,000				28	OK	28	
	- Uang Harian	2,660,000				28	OH	28	
	- Pertemuan Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah	11,116,000				28	OH	28	
		20,000,000				1	Dokumen	1	
	Dukungan Teknis [ Base Line ]					1	Dokumen	1	
	SID Cetak Sawah ( QW )								
	Persiapan ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )	10,000,000							
	KABUPATEN LUWU TIMUR								
	<u>Belanja Bahan</u>	1,710,000							
	- Konsumsi	1,700,000				20	OK	20	
	- Selisih	10,000				1	Kali	1	
	<u>Belanja Sewa</u>	4,690,000							
	- Sewa Kendaraan	4,690,000				5	Hari	5	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	3,600,000							

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	> Identifikasi dan sosialisasi kegiatan SID Mendukung QW Ekstensifikasi Cetak Sawah tahun 2026								
	- Uang Harian	1,000,000				5	OH	5	
	- Transport	2,600,000				5	OK	5	
	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>10,000,000</b>							
	<b>KABUPATEN LUWU TIMUR</b>								
	<u><b>Belanja Bahan</b></u>	<b>1,710,000</b>							
	- Konsumsi ( 22 orang x 2 kali )	1,700,000				20	OK	20	
	- Selisih	10,000				1	Kali	1	
	<u><b>Belanja Sewa</b></u>	<b>4,690,000</b>							
	- Sewa Kendaraan	4,690,000				5	Hari	5	
	<u><b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b></u>	<b>3,600,000</b>							
	> Monitoring dan Evaluasi kegiatan SID Mendukung QW Ekstensifikasi Cetak Sawah tahun 2026								
	- Uang Harian	1,000,000				5	OH	5	

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				Perangkat Daerah PJ
		ANGGARAN	REALISASI	%	Indikator Program Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Transport	2,600,000				5	OK	5	

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Diolah tahun 2026

#### 4.2. Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dinas pertanian dan ketahanan pangan mendapatkan tugas pembantuan urusan pemerintahan yang telah ditangani oleh bidang prasarana dan sarana tahun 2025. Bidang tersebut secara aktif menangani berbagai tugas pembantuan untuk mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di wilayah kecamatan mahalona . Fokus utamanya adalah memperkuat peningkatan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat kabupaten luwu timur yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian sawah.

Salah satu tugas pembantuan terbesar adalah rehabilitasi dan pembangunan irigasi di wilayah kecamatan towuti dengan luas lahan 518.49 Ha yang berada di lokasi desa mahalona, Kalosi, Tole dan matompi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini maka pada tugas pembantuan telah dianggarkan prasarana dan sarana yakni pengadaan alat mesin pertanian, adapun tujuan dengan adanya tugas pembantuan ini adalah untuk mempercepat pembangunan areal persawahan dengan tujuan untuk peningkatan swasembada pangan.

Tabel 4.3

Uraian Kinerja, Permasalahan dan Solusi pelaksanaan  
Tugas pembantuan Dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025

N o.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/permasa lahan	Solusi
1	2	3	4	5	6
	<b>BIDANG PRASARANA DAN SARANA</b>				
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7,800,000	Secara umum pelaksanaan tugas pembantuan APBN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengasn ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Program dan kegiatan yang	Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat, penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan kelender dan kondisi lapangan, serta keterbatasan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur telah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait, mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dan
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian				
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Base Line)				
	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)				
	Persiapan, Monev, dan Pelaporan (QW Intensifikasi)				
	LWU TIMUR				
	<u>Belanja Bahan</u>				

	- Penggandaan Dokumen Database/Inventarisasi Alsintan dan UPJA		dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi pertanian, penguatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas petani/kelompok tani. Penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan daapt terlaksana tepat sasaran dan mendukung pencapaian target pembangunan pertanian dsikabupaten luuw timur.	sumber daya pendukung di daerah.	pendampingan di lapangan , melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan tugas pembantuan APBN tersebut berjalan lebih efektif dan efisien dan tepat waktu.
	- Fotocopy dokumen, surat, dll				
	- Penggandaan Petunjuk Pelaksanaan				
	<b><u>Belanja Honor Output Kegiatan</u></b>				
	- Honor Petugas input BAST Online dan Pemanfaatan Alsintan				
	- Honor Petugas Pemeriksa				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				
	- Monitoring Pemanfaatan Alsintan dan pengumpulan data/informasi Alsintan dan UPJA				
	- Pendampingan, verifikasi/monitoring Alsintan dan pembinaan kelembagaan UPJA				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u></b>				
	- Koordinasi Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA				
	- Koordinasi Penyaluran/BAST dan Laporan Pemanfaatan Alsintan				
	- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Pemanfaatan, Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan				
	- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Penyaluran Alsintan/BAST dan Laporan				
	<b>Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</b>	<b>6,000,000</b>			
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat [ Base Line ]</b>	<b>6,000,000</b>			
	<b>Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi</b>	<b>6,000,000</b>			



	<b>Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi</b>				
	<b>LUWU TIMUR</b>				
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>				
	- ATK/Fotocopy/Komputer Supplies				
	- Dukungan Pulsa Tim Pendataan, Entry, dan Updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi				
	- Dukungan Pulsa Tim Admin Kabupaten				
	<b><u>Belanja Honor Ouput Kegiatan</u></b>				
	- Honor Admin Kabupaten/Kota				
	- Honor Tim Pendataan, Entry, dan Updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				
	- Pengawasan/monitoring/koordinasi pendataan penerima pupuk bersubsidi				
		<b>6,000,000</b>			
	<b>Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi</b>				
	<b>LUWU TIMUR</b>				
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>				
	- Dukungan Pulsa Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan/Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani				
	<b><u>Belanja Honor Ouput Kegiatan</u></b>	<b>6,000,000</b>			
	- Honor Tim Pembina Kabupaten	750,000			
	- Honor Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani	5,250,000			
	<b>Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida</b>				
	<b>Persiapan, Monev, dan Pelaporan</b>				
	<b>LUWU TIMUR</b>				

	<b><u>Belanja Bahan</u></b>				
	- Penjilidan dan Penggandaan Laporan				
	<b><u>Belanja Jasa Lainnya</u></b>				
	- Pengiriman Laporan				
	- Pengiriman Laporan				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				
	- Konsultasi ke Provinsi				
	<b>Pelaksanaan Kegiatan</b>				
	<b>LUWU TIMUR</b>				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				
	- Monitoring dan Pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida				
	- Identifikasi Peredaran dan Penggunaan dan Pestisida di kios dan di tingkat Kelompok Tani ( Petani )				
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>1,800,000</b>			
	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP</b>	<b>1,800,000</b>			
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal [ Base Line ]</b>				
	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>	<b>1,800,000</b>			
	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>				
	<b>KAB. LUWU TIMUR</b>				
	<b><u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u></b>	<b>1,800,000</b>			
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar )	1,330,000			
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran ( pagu dana di atas Rp2,5 s.d. Rp5 miliar )	470,000			
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>				
	- ATK				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				

	- Koordinasi dan Konsultasi ke provinsi				
	<b>BIDANG PRASARANA DAN SARANA</b>				
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>8,664,377</b>			
	<b>Perlindungan dan Penyediaan Lahan</b>	<b>8,664,377</b>			
	<b>Prasarana Pengembangan Kawasan (Base Line)</b>	<b>8,664,377</b>			
	<b>Cetak Sawah (QW)</b>	<b>8,664,377</b>			
	<b>Persiapan (QW Eksensifikasi Cetak Sawah)</b>	<b>3,296,000</b>			
	<b>Kabupaten Luwu Timur</b>				
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>				
	- Konsumsi				
	- Pencetakan Peta, Penggandaan Buku, Bahan Rapat dll				
	- Selisih				
	<b><u>Belanja Sewa</u></b>	<b>3,296,000</b>			
	- Sewa Kendaraan	3,296,000			
	- Sewa Drone				
	<b><u>Belanja Jasa Profesi</u></b>				
	- Honor Narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus/FGD (Setara Eselon II)				
	- Honor Narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus/FGD (Setara Eselon III)				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				
	<u>&gt; Perjalanan Koordinasi ke Pusat dari Provinsi</u>				
	- Uang Harian				
	- Tiket PP				
	- Penginapan				
	<u>&gt; Identifikasi dan sosialisasi kegiatan Cetak Sawah QW Provinsi Sulawesi Selatan</u>				
	- Uang Harian				

	- Transport				
	- Bantuan Transport Kabupaten				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u></b>				
	> Pertemuan Koordinasi Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian				
	- Transport				
	- Uang Harian				
	- Pertemuan Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah				
	<b>Konstruksi ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )</b>				
	<b>KABUPATEN LUWU TIMUR</b>				
	<b>Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</b>				
	- Konstruksi Cetak Sawah ( 1300 Ha )				
	700 Ha )				
	<b>Monev dan Pelaporan ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )</b>	<b>5,368,377</b>			
	<b>KABUPATEN LUWU TIMUR</b>				
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>	<b>5,368,377</b>			
	- Konsumsi	1,250,000			
	- Pencetakan Peta, Penggandaan buku, Bahan Rapat dll	4,118,377			
	- Selisih				
	<b><u>Belanja Sewa</u></b>				
	- Sewa Kendaraan				
	- Sewa Drone				
	<b><u>Belanja Jasa Profesi</u></b>				
	- Honor Narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus/FGD ( Setara eselon III )				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				
	> Perjalanan Koordinasi ke Pusat dari Provinsi				
	- Uang Harian				

	- Tiket PP				
	- Penginapan				
	> <i>Pemantauan dan evaluasi kegiatan Cetak Swah QW</i>				
	- Uang Harian				
	- Transport				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u></b>				
	- Transport				
	- Uang Harian				
	- Pertemuan Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah				
	<b>Dukungan Teknis [ Base Line ]</b>				
	<b>SID Cetak Sawah ( QW )</b>				
	<b>Persiapan ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )</b>				
	<b>KABUPATEN LUWU TIMUR</b>				
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>				
	- Konsumsi				
	- Selisih				
	<b><u>Belanja Sewa</u></b>				
	- Sewa Kendaraan				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				
	> <i>Identifikasi dan sosialisasi kegiatan SID Mendukung QW Ekstensifikasi Cetak Sawah tahun 2026</i>				
	- Uang Harian				
	- Transport				
	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>				
	<b>KABUPATEN LUWU TIMUR</b>				
	<b><u>Belanja Bahan</u></b>				
	- Konsumsi ( 22 orang x 2 kali )				
	- Selisih				
	<b><u>Belanja Sewa</u></b>				
	- Sewa Kendaraan				
	<b><u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u></b>				

	> <i>Monitoring dan Evaluasi kegiatan SID Mendukung QW Ekstensifikasi Cetak Sawah tahun 2026</i>				
	- Uang Harian				
	- Transport				

*Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Diolah tahun 2026*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 secara umum dapat menggambarkan keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima serta realisasi pencapaian kinerja tahun 2025. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan pangan, urusan pertanian, serta urusan penunjang.

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, pengembnagna sektor pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dan tantangan, secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan efektif dan akuntabel serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dikabupaten luwu timur, dengan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan anggaran guna mendukung terwujudnya kabupaten luwu timur yang maju dan sejahtera.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten luwu timur selama tahun 2025. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut.

Terima kasih.

Plt. Kepala Dinas



**SUBHANG, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 197103252002121005